

RENCANA KERJA

TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada RKPD Kota Palu Tahun 2025 dan Renstra DPMPTSP Kota Palu.

Demikian Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025 ini kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk demi kesempurnaan dokumen tahunan ini.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Palu, 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU**



Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681028 199403 2 016

DAFTAR ISI

Halaman		
Judul		
Kata		ii
Pengantar		
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA PALU TAHUN 2023	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu	38
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu	40
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA PALU	66

	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Palu	67
	3.3 Program dan Kegiatan	68
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA PALU	78
BAB V	: PENUTUP	88
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023 Kota Palu	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	39
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Palu	47
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	69
Tabel 4	Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025	81

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah merubah paradigma pembangunan dengan melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun dokumen perencanaan secara bertahap termasuk Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud implementasi sistem perencanaan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu, Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, serta Rencana Kerja DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Palu 2025 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025 yang merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arrah pedoman terhadap semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palu.

Renja sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu

Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 14);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu pada Tahun 2025.

b. Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025 bertujuan:

- Sinkronisasi Dokumen Perencanaan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu 2021-2026;
- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025;
- Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran DPMPTSP Kota Palu

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Palu
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan DPMPTSP Kota Palu

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA PALU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan penjabaran Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palu Tahun 2023.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 secara kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Rata-rata setiap indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai 100%. Hal ini juga dapat dilihat dengan merujuk pada capaian Indikator Kinerja Utama yang sebagian besar mencapai 100%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palu menetapkan 2 Tujuan Strategis dan 2 Sasaran Strategis serta 8 Indikator Kinerja yang harus dicapai periode Tahun 2021-2026. Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palu dapat mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase peningkatan investasi sebesar 33.28% dari Target 5%;
- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sejumlah 239 investor dari target 58 investor;
- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sejumlah Rp.1.272.000.000.000 dari target Rp.385.880.000.000;
- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja rata-rata sejumlah 8 Orang/Perusahaan dari target 3 Orang/Perusahaan;
- Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar - 45,09% dari Target 5%;
- Nilai Reformasi birokrasi DPMPTSP berkategori B dari Target B;
- Indeks Kepuasan Masyarakat berkategori Sangat Baik dari Target Baik; dan
- Nilai SAKIP berkategori A dari Target B.

Berdasarkan target dan realisasi kinerja di atas, hanya 1 Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Indikator tersebut ialah Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar -45,09% dari Target 5%. Hal ini disebabkan tingginya realisasi pembanding yang menggunakan realisasi investasi Tahun 2022 sebesar Rp.852.737.500.000, sedangkan realisasi investasi Tahun 2023 hanya sebesar Rp.468.267.490.000. Namun jika dibandingkan dengan target Nilai Investasi Tahun 2023 sebesar Rp.385.875.000.000, maka sesungguhnya Nilai Investasi Tahun 2023 telah melampaui target yang telah direncanakan. Namun hal ini tetap menjadi catatan untuk perbaikan di tahun 2025.

Sementara itu capaian realisasi keuangan pada program, kegiatan dan sub kegiatan hanya sebesar 97,16%. Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan real pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga menimbulkan selisih antara pagu anggaran dan realisasinya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indikator kinerja, karena kegiatan tetap terlaksana sesuai harapan dan anggaran dipergunakan secara efisien. Oleh karena itu, jika berdasarkan realisasi anggaran program, maka **Program yang tidak memenuhi target yang direncanakan** adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 97,36%;
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian 99,64%;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian 87,83%; dan
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian 99.41%.

Realisasi anggaran Program yang telah memenuhi target yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian 100%;
- Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian 100%.

Faktor-faktor penyebab tercapainya target indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang oleh Pimpinan;

- Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023;
- Mudahnnya media yang dapat diakses oleh masyarakat baik untuk mendapatkan informasi perizinan maupun untuk mendapatkan legalitas Perizinan dalam berusaha. Informasi perizinan dapat diakses melalui WhatsApp, pelayanan pendampingan, sms gateway dan website dpmptsp.palukota.go.id. Sedangkan pelayanan legalitas Perizinan Berusaha dapat diakses secara online melalui esiga.palukota.go.id dan oss.go.id serta simbg.pu.go.id;
- Pelaksanaan sosialisasi Tata Cata Penginputan Rencana Investasi pada oss.go.id dan Tata Cara Pelaporan LKPM dilakukan secara terus menerus;
- Kegiatan pendampingan berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Investor dalam merealisasikan investasinya, Pengawasan lapangan terkait Percepatan realisasi investasi, serta proses pendampingan terkait penginputan pelaporan LKPM juga dilakukan secara intens.

Capaian target Indikator Kinerja Tahun 2023
berimplikasi sangat baik terhadap target capaian sasaran Renstra DPMPTSP Kota Palu periode 2021-2026 yang sudah sesuai dengan perencanaannya. Sehingga target kinerja pada akhir periode Renstra DPMPTSP Kota Palu periode 2021-2026 diupayakan akan tercapai.

Meskipun target Indikator Kinerja Tahun 2023 tercapai dengan baik, namun untuk mendukung optimalnya capaian sasaran strategis, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu perlu mengambil **kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran** untuk

mengatasi faktor tersebut yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2025. kebijakan/tindakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang penyelenggaraan Perencanaan, pengembangan iklim investasi, Pelayanan perizinan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Sistem Informasi Teknologi.
2. Peningkatan pengembangan investasi yang difokuskan pada penyusunan perencanaan, pengembangan iklim investasi dan peningkatan promosi potensi dan peluang investasi sebagai daya tarik investasi.
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025-2040 dan Penyusunan Analisis Potensi dan Peluang Investasi.
4. Pengembangan dan Penataan database, sistem aplikasi pelayanan perizinan dan data potensi investasi Penanaman Modal secara lengkap dan akurat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yaitu tempat kerja yang memadai untuk kenyamanan pelayanan serta tersedianya lahan parkir yang memudahkan pelaku usaha untuk pengurusan izin.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023
Kota Palu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingk at Realis asi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP DPMTSP	A	B	B	A		BB	BB	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran n, dan	21	Dokum en 4	Dokum en 4	Dokum en 4	100%	Dokum en 4	12 Dokum en	57%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>								
2.18.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%
2.18.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.18.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	3 Laporan	60%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	100 %	100 %	96 %	96%	99 %	99%
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 orang/bulan	38 orang/bulan	38 orang/bulan	34 orang/bulan	89%	110 orang/bulan	58%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lapora n	1 Dokum en	1 Lapora n	1 Dokum en	100%	1 Lapora n	3 Lapora n	60%
2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Lapora n	1 Dokum en	1 Lapora n	1 Dokum en	100%	4 Lapora n	6 Lapora n	120%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10 /4)
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemu nuhan kebutuhan Admini strasi Kepegawaia n Perangk at Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.18.01.2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	6 Orang	60%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemu nuhan kebutuhan admini strasi umum perangk at daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.18.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	60%
2.18.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	21 Paket	60%
2.18.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	5 Paket	250%	2 Paket	9 Paket	90%
2.18.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang Disediakan							
2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33%	28 Laporan	47%
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	38 Laporan	109%	108 Laporan	62%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
2.18.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	2 Jenis	2 Paket	4 Jenis	200%	8 Paket	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	3 Unit	5 Unit	167%	3 Unit	11 Unit	73%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemu- naan jasa penun- jang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.18.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	100%	12 Lapora n	36 Lapora n	60%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemerintahan kebutuhan pemeliharaan n barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	91 %	91%	100 %	97 %	97%
2.18.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	21 Unit	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
2.18.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	58 Unit	58 Unit	31 Unit	53%	58 Unit	147 Unit	51%
2.18.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
2.18.01.2.09.0 011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	70 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	42 Unit	60%
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	5 %	5 %	5 %	33.2 8 %	100%	5 %	5 %	
02.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Di bidang penanaman Modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
02.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	250 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	100%	1 Kegiatan Usaha	101 Kegiatan Usaha	40%
02.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat at Realis asi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	daerah Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
02.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen						0%
02.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen						0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
02.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	33%
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	67 Investor	55 Investor	58 Investor	239 Investor	100%	61 Investor	355 Investor	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	446.70 Miliar	367.50 Miliar	385.88 Miliar	### Miliar	100%	405.17 Miliar	2045 Miliar	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kota Palu	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	100 %	83 %	83%
02.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	
02.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
		Modal								
02.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 0 Usaha	Pelaku Usaha 2000	Pelaku Usaha 2000	3218 Usaha	161%	2000 Pelaku Usaha	7218 Pelaku Usaha	72%
02.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	1000 0 Usaha	Pelaku Usaha 2000	Pelaku Usaha 2000	Pelaku Usaha	0%	2000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
		Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
02.18.04.2.01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha 200	Kegiatan Usaha 200	Kegiatan Usaha 205	103%	Kegiatan Usaha 605	61%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	0%	200 Kegiatan Usaha	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	5 Orang	5 Orang	10 Orang	200%	20 Orang	80%
02.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	25 Orang	5 Orang	5 Orang	Orang	0%	10 Orang	40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
		Terintegrasi secara Elektronik								
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggar anya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
02.18.05.2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1750 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	0%	12 Kegiatan Usaha	362 Kegiatan Usaha	21%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1750 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	0%	12 Kegiatan Usaha	362 Kegiatan Usaha	21%
02.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1750 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	100%	350 Pelaku Usaha	1050 Pelaku Usaha	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1750 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0%	350 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	40%
02.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1000 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	100%	200 Kegiatan Usaha	600 Kegiatan Usaha	60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/ 6)	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
02.18.05.2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1000 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	0%	400 Kegiatan Usaha	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan kinerja perlu dilakukan suatu analisis kinerja pelayanan yang menyeluruh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, Hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang telah mengubah pola perencanaan, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi bahwa pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan belum terlaksana secara optimal. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu

N o.	Indikator	S P M	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tah un 202 3	Tah un 202 4	Tah un 202 5	Tah un 202 6	Tahu n 2023	Tah un 202 4	Tah un 202 5	Tah un 202 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan investasi		5%	5%	5%	5%	5%	33.28 %	-	5%	5%	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)		67	58	61	64	67	239	-	64	67	
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)		446.70	385.88	405.17	425.43	446.70	1272.14	-	425.43	446.70	
4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN		5%	5%	5%	5%	5%	- 45.09 %	-	5%	5%	
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		3	3	3	3	3	8	-	3	3	
6	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP		A (>80-90)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	B (64,19)	-	BB (>70-80)	A (>80-90)	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik (88,31=100)	Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (88,31=100)	Sangat Baik (88,31=100)	Sangat Baik (88,31=100)	Sangat Baik (97,6)	-	Sangat Baik (88,31=100)	Sangat Baik (88,31=100)	
8	Nilai SAKIP		A (>80-90)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (81,10)	-	BB (>70-80)	A (>80-90)	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upaya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-government*. Pelaksanaan *e-government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus melakukan perbaikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan, diantara perbaikan tersebut yaitu:

- a. Proses pelayanan perizinan dikendalikan oleh Sistem Aplikasi yang berbasis teknologi informasi, *Tracking* dokumen dapat dilakukan dengan sangat mudah, Hak akses setiap petugas dipisahkan berdasarkan kewenangan, sehingga tidak memungkinkan *bypass* prosedur Pelayanan perizinan;
- b. Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, pemohon dapat melakukan *tracking* dokumen melalui SMS dengan cara ketik **nama spasi jenis izin** kirim ke **0811 450 1142**, aplikasi akan memberikan jawaban sms mengenai status terakhir proses pelayanan perizinan;

- c. Informasi perizinan dapat diperoleh melalui Komputer *Touch Screen* yang dapat memberikan informasi secara mudah;
- d. Dengan penggunaan *QR-CODE* dapat memudahkan untuk mendeteksi dokumen izin yang asli atau tidak asli;
- e. Pendaftaran secara online melalui E-SIGA (Sistem Informasi, Pengendalian dan pelayanan);
- f. Pendaftaran secara online melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission) yang terkoneksi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- g. Tanda Tangan Elektronik untuk dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Sandi Negara/BSrE.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang luas kepada penerima layanan, akan tetapi hal tersebut dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang harus ditemui, yaitu:

- a. **Jumlah Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi masih kurang**, sehingga perlunya rekrutmen Pegawai berdasarkan kompetensi dan Penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan PTSP dapat dilaksanakan secara utuh. Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penanam modal olehnya itu perlunya Komitmen dan motivasi yang tinggi seluruh karyawan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional;
- b. **Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor antar**

Penyelenggara PTSP dan Perangkat Daerah Teknis perlu Sinergitas dan sinkronisasi prinsip dan mekanisme pelayanan, penyebab dari permasalahan tersebut adalah Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang saling terintegrasi dalam hal pengelolaan pelayanan perizinan dan fungsi koordinasi belum terlaksana secara optimal;

- c. **Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi belum optimal**, permasalahannya adalah fungsi dan potensi system aplikasi dan sumber daya manusia pengelola aplikasi masih sangat terbatas sehingga penyediaan *database* belum terlaksana secara optimal;
- d. **Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan masih sangat minim**, sehingga perlunya proses perencanaan dan penganggaran agar lebih terarah kepada hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh organisasi;
- e. **Legalitas dokumen penunjang pelaksanaan pengembangan iklim investasi**, merupakan faktor yang sangat dibutuhkan untuk menunjang penanam modal dalam melaksanakan penanaman modalnya di daerah;
- f. **Pelaku usaha yang belum mematuhi Aturan tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal**, faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi, *workshop* dan bimbingan kepada penanam modal sehingga kesadaran akan pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal belum dilaksanakan secara optimal dan akibatnya realisasi penanam modal tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Menyikapi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan tantangan yang harus diselesaikan sehingga tujuan akhir dari proses pelayanan dapat dicapai. Dari hasil analisa yang dilakukan masih terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Kurangnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi;
- c. Kebijakan yang sering berubah-ubah.

Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peluang untuk memberikan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

- a. Kota Palu sebagai wilayah strategis dan sebagai Ibu Kota Propinsi, Kota Palu identik dengan kota beragam dimensi, antara lain ada yang menyebutnya sebagai Kota Lembah dan atau Kota Teluk. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, kota ini cenderung berkembang ke arah kota permukiman, kota transit, kota jasa, kota pendidikan, kota destinasi wisata dan kota perdagangan. Selain itu Kota ini juga tumbuh dan berkembang dengan pasokan listrik yang terbatas dan dukungan dari daerah-daerah sekitarnya, seperti dari aspek pangan. Dibalik keterbatasan dan kekurangannya, Kota ini tetap memiliki kelebihan terutama kelengkapan ornamen alam yang dimilikinya yaitu teluk yang berbentuk elips yang menghadap ke utara dengan bibir pantai yang eksotik

sepanjang 40 Km, barisan pegunungan pada sisi timur dan barat, lembah di selatan kota, perbukitan di seputar kota, dan sungai yang membelah kota yang kesemuanya merupakan potensi menjadikan Kota Palu sebagai Kota Wisata yang akan mengantar masyarakatnya menuju Kota Palu yang sejahtera. Untuk menuju ke arah kota yang sejahtera, Kota Palu memerlukan banyak hal, terutama dari aspek logistik. Keberadaan sistem logistik dimulai dari memperbaiki aspek ketersediaan bahan baku guna menjamin proses produksi, sekaligus dapat menjamin kebutuhan pasar dengan cara memperbaiki tata niaga. Dengan memperbaiki sistem logistik ini turut membuka peluang untuk tenaga kerja lokal maupun non lokal.

- c. Tuntutan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Cepat dan Memuaskan Masyarakat. Salah satu faktornya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara utuh.

- d. Perkembangan Teknologi Informasi Yang Cukup Cepat.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa isu strategis penyelenggaraan pelayanan, yaitu:

- 1. Peningkatan daya saing penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi melalui Proses pelayanan

- perizinan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang paripurna dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 3. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
 4. Pengelolaan system informasi secara elektronik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2025, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu terus mengadakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanannya. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan penganggaran yang memadai. Catatan penting terkait dengan kebutuhan penganggaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 yang mengamanatkan penyelenggaraan **Mal Pelayanan Publik** pada Pemerintah daerah Kota, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.
2. Penambahan jumlah honorarium dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS. Hal ini juga merupakan wujud dari Agenda “Pemerintahan Mantap Melayani” dengan sasaran program unggulan

“meningkatnya nilai insentif honorer” yang telah tertuang pada RPJMD Kota Palu 2021-2026.

3. Penyediaan Kendaraan Dinas sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2025, untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
4. Penambahan sarana berupa peralatan kerja (komputer, printer, kursi kerja) untuk mendukung kinerja pegawai yang saat ini masih sangat kurang.
5. Penyediaan prasarana berupa bangunan gedung kantor dan pemeliharaan bangunan untuk kenyamanan masyarakat pada saat menerima layanan.
6. Peningkatan Sistem Aplikasi Daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan DPMPTSP.
7. Penambahan jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya.
8. Bertambahnya jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang harus disusun pada Tahun 2025.
9. Program Promosi Penanaman Modal yang membutuhkan penambahan anggaran dalam upaya meningkatkan minat investor di Kota Palu.
10. Program Pelayanan Penanaman Modal yang membutuhkan penambahan anggaran dalam upaya percepatan pelayanan perizinannya.

Beberapa poin penjabaran tersebut diatas akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih urgent. Hal ini juga merupakan upaya tindaklanjut atas rekomendasi Inspektorat Kota Palu yang tertuang dalam LHE AKIP DPMPTSP Kota Palu Tahun 2023 Nomor 703/24-LAKIP/RHS-IBII/ITKOT/2024. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Palu

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target - Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.18.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA	Kot a Palu	Nilai SAKIP DPMPTSP	BB	5,781,042,03 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kot a Palu	Nilai SAKIP DPMPTSP	A	6,210,377,080.0 0	
2.18.01.2.0 1	Perencanaan , Pengangara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan , Pengangara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Doku men	875,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Doku men	2,075,000.00	
2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Doku men	175,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Doku men	475,000	
2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	650,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	475,000	
2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	475,000	
2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase realisasi keuangan	100 %	3,909,767,280.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase realisasi keuangan	100 %	3,910,067,280.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang / bulan	3,909,417,280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / bulan	3,909,417,280	
2.18.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	325,000	
2.18.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	325,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	16,850,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	87,850,000.00	
2.18.01.2.05.0002						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket		
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	16,850,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	87,850,000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	444,771,550.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	803,755,300.00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	790,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,550,500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 6.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	300,835,700	
2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	81,613,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	81,631,500	
2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13,832,150	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17,878,400	
2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,600,000	
2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,680,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,919,200	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	338,221,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	392,340,000	
2.18.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	105,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	60,208,300.00	
2.18.01.2.0 7.0002						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
2.18.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	70,000	Pengadaan Mebel	Kota Palu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	39,436,300	
2.18.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20,772,000	
2.18.01.2.0 8	Penyediaan jasa Penunjang Urusan	Kota Palu	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100 %	903,447,200.00	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Palu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	882,879,200.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Pemerintahan Daerah	3	4 urusan pemerintahan daerah	5	6	7 Daerah	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	334,612,000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	554,147,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	548,267,200	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	505,226,000.00	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	463,542,000.00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 Unit	403,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pejaknya	9 Unit	403,500,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan pajaknya			Jabatan					
2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	29,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	29,300,000	
2.18.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	14,400,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12,940,000	
2.18.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	46,701,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	9,872,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahil提高	14 Unit	11,325,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahil提高	13 Unit	7,930,000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Palu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5 %	1,225,000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Palu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5 %	522,703,200.00	
2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Palu	Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan	100 %	525,000.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Palu	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	100 %	110,818,200.00	
2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	2 Perda	350,000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	81,770,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Penanaman Modal	3	4 Kemudahan Penanaman Modal	5	6	7	8	9	10	11	12
02.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 kegiatan usaha	175,000						
2.18.02.2.01.0003						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	29,048,200	
02.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta dan Peluang Investasi	100 %	700,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100 %	411,885,000.00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Perda	350,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	249,067,500	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.18.02.2. 02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	350,000						
2.18.02.2.0 2.0004						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	162,817,500	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	1.Jumlah Investor Berskala Nasional; 2.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	64 Investor 425. 43 Miliar	76,000,000	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	1.Jumlah Investor Berskala Nasional; 2.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	64 Investor 425. 43 Miliar	448,757,200.00	
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Tertakhsan ya Kegiatan Pameran	100 %	76,000,000.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %	448,757,200.00	
02.18.03.2. 01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi	1 Dokumen							

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03.2.0 1.0003			Penanaman Modal Kewenangan/ Kota								
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Doku men		
2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Doku men	76,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Doku men	448,757,200	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat	San gat Baik	115,075,800	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat	San gat Baik	194,066,400.00	
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	Kota Palu	Terlaksanaan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100 %	115,075,800.00	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	100 %	194,066,400.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	Kota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	110,100,800						
2.18.04.2.01.0006						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	144,550,000	
02.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan	200 Kegiatan Usaha	4,800,000						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bersaha dan Non Perizinan Penanaman Modal								
2.18.04.2.0 1.0008						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	11,400,000	
02.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Palu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Orang	175,000						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.04.2.0 1.0007						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	38,116,400	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	592,729,750	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	592,729,900.00	
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	592,729,750.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	100 %	592,729,900.00	
02.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	183,785,750.00						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modal								
2.18.05.2.0 1.0004						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 Kegiatan Usaha	195,775,000	
02.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	297,244,000						
2.18.05.2.0 1.0005						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Palu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	283,079,900	
02.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	200 Kegiatan Usaha	111,700,000						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan								
2.18.05.2.0 1.0006						Pengawasan Penanaman Modal	Kota Palu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	113,875,000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kot a Palu	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	60,175,000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kot a Palu	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	385,350,000.00	
2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %	60,175,000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %	385,350,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Laporan	60,175,000							
2.18.06.2.01.0002						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	385,350,000		
JUMLAH					6,626,247,580	JUMLAH					8,353,983,780	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Dokumen 1	249,067,500	APBD		Dokumen	-
2.18.02.2.02.004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Dokumen 1	162,817,500	APBD		Dokumen 1	98,699,699.53
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	1.Jumlah Investor Berskala Nasional; 2.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	Kota Palu	Investor 64 425.43 Miliar	448,757,200.00	APBD	Program Wajib	Investor 67 446.70 Miliar	49,147,418.28
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	% 100	448,757,200.00	APBD		% 100	49,147,418.28
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Kota Palu	Dokumen 1	448,757,200	APBD		Dokumen 2	49,147,418.28
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Palu	Sangat Baik	194,066,400.00	APBD	Program Wajib	Sangat Baik	128,343,805.66
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	% 100	194,066,400.00			% 100	128,343,805.66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.0 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	2000 Pelaku Usaha	144,550,000	APBD		2000 Pelaku Usaha	97,433,629.12
2.18.04.2.01.0 008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Palu	200 Kegiatan Usaha	11,400,000	APBD		200 Kegiatan Usaha	25,455,088.27
2.18.04.2.01.0 007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	5 Pelaku Usaha	38,116,400	APBD		5 Pelaku Usaha	5,455,088.27
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palu	100 %	592,729,900.00	APBN / APBD	Program Wajib	100 %	95,083,921.39
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu	Kota Palu	100 %	592,729,900.00			100 %	95,083,921.39

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usaha lainnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palu	12 Kegiatan Usaha	195,775,000	APBN / APBD		12 Kegiatan Usaha	30,928,621.43
2.18.05.2.01.005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palu	350 Pelaku Usaha	283,079,900	APBN / APBD		350 Pelaku Usaha	37,226,678.52
2.18.05.2.01.006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Palu	200 Kegiatan Usaha	113,875,000	APBN / APBD		200 Kegiatan Usaha	26,928,621.43
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kota Palu	100 %	385,350,000.00	APBD	Program Wajib	100 %	143,311,283.87
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	100 %	385,350,000.00			100 %	143,311,283.87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01.0 002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Pahu	12 Dokum en	385,350,000	APBD		12 Dokum en	143,311,283.87
					8,353,983,780.00				6,073,890,752.25

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPPTSP KOTA PALU

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sesuai dengan usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

I. Program Utama

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Investasi di Kota Palu. Program ini pada Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.522.703.200**

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Investasi di kota Palu. Program ini pada Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.448.757.200**

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan. Program ini pada Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.194.066.400**

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk Percepatan Realisasi Investasi di Kota Palu. Program ini pada Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.592.729.900**

5) Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk menyediakan Data dan Informasi Penanaman Modal di Kota Palu. Program ini pada Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.385.350.000**

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu Indikatif sebesar **Rp.2.075.000**

2) Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk menyediakan Dokumen Realisasi Keuangan DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.3.910.067.280**

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.87.850.000**

4) Administarasi Umum Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan kegiatan Administrasi Umum DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.803.755.300**

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.60.208.300**

6) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp.882.879.200**

7) Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk memelihara barang milik daerah penunjang pelayanan DPMPTSP. Tahun 2025 memiliki Kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp.463.542.000**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Tahun 2025 juga telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4
Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DPMPTSP	Kota Palu	A	6,210,377,080.00	APBD	Program Penunjang
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 Dokumen	2,075,000.00	APBD	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Palu	1 Dokumen	475,000	APBD	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	650,000	APBD	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	475,000	APBD	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	475,000	APBD	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100 %	3,910,067,280.00	APBD	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	30 Orang/ bulan	3,909,417,280	APBD	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	325,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 Laporan	325,000	APBD	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100 %	87,850,000.00	APBD	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu	59 Paket		APBD	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	10 Orang	87,850,000	APBD	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100 %	803,755,300.00	APBD	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 Paket	1,550,500	APBD	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	32 Paket	300,835,700	APBD	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 Paket	81,631,500	APBD	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 Paket	17,878,400	APBD	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 Dokumen	5,600,000	APBD	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 Laporan	3,919,200	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	38 Laporan	392,340,000	APBD	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100 %	60,208,300.00	APBD	
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit		APBD	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	12 Unit	39,436,300	APBD	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 Unit	20,772,000	APBD	
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100 %	882,879,200.00	APBD	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	334,612,000	APBD	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	548,267,200	APBD	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100 %	463,542,000.00	APBD	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	9 Unit	403,500,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 Unit	29,300,000	APBD	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	18 Unit	12,940,000	APBD	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Palu	1 Unit	9,872,000	APBD	
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Palu	13 Unit	7,930,000	APBD	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Kota Palu	5 %	522,703,200.00	APBD	Program Wajib
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Capaian Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	Kota Palu	100 %	110,818,200.00	APBD	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu	2 Dokumen	81,770,000	APBD	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kota Palu	1 Dokumen	29,048,200	APBD	
02.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu		100 %	411,885,000.00	APBD	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	1 Dokumen	249,067,500	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Kota Palu	1 Dokumen	162,817,500	APBD	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	1.Jumlah Investor Berskala Nasional; 2.Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	Kota Palu	64 Investor 425.43 Miliar	448,757,200.00	APBD	Program Wajib
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kota Palu	100 %	448,757,200.00	APBD	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Kota Palu	1 Dokumen	448,757,200	APBD	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Palu	Sangat Baik	194,066,400.00	APBD	Program Wajib
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	100 %	194,066,400.00		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	2000 Pelaku Usaha	144,550,000	APBD	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Palu	200 Kegiatan Usaha	11,400,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	5 Pelaku Usaha	38,116,400	APBD	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palu	100 %	592,729,900.00	APBN/ APBD	Program Wajib
2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Capaian Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Palu</i>	<i>Kota Palu</i>	<i>100 %</i>	<i>592,729,900.00</i>		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palu	12 Kegiatan Usaha	195,775,000	APBN/ APBD	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palu	350 Pelaku Usaha	283,079,900	APBN/ APBD	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Palu	200 Kegiatan Usaha	113,875,000	APBN/ APBD	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kota Palu	100 %	385,350,000.00	APBD	Program Wajib

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	100 %	385,350,000.00		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	12 Dokumen	385,350,000	APBD	
					8,353,983,780.00		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target-target yang ada. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian dengan mengurangi anggaran serta melakukan penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2025 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu 2021-2026;
2. Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025;
3. Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian Rencana Kerja Tahun 2025, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna menjamin tercapainya target kinerja yang direncanakan.

Palu, 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU**

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681028 199403 2 016

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balaikota Selatan Nomor 01 Palu Kode Pos 94124
Telepon (0451) 428334 – Fax. (0451) 428787 Email dpmpstpkotapalu@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
NOMOR : 000.7.2.6/1/DPMPTSP/II/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PALU TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025 termasuk capaian kemajuannya;
- b. mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
- c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025;
- d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025;
- e. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025;
- f. menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 3 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu



Dra. Irmawati Alkaf, M.si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810281994032016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALU
NOMOR: 000.7.2.6/1/DPMPTSP/II/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah	Koordinator
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Koordinator
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Regulasi dan Evaluasi	Koordinator
7.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Staf Sekretariat DPMPTSP	Anggota

Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu



Dra. Irmawati Alkaf, M.si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196810281994032016